BAB IV

ANALISIS PRAKTEK KERJA LAPANGAN

4.1. Analisis Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

Analisis system merupakan kegiatan penguraian suatu system informasi yang utuh dan nyata ke dalam komponen yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah-masalah yang muncul, sehingga mengarah kepada suatu solusi untuk perbaikan maupun pengembangan kea rah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan.

4.1.1. Analisis Dokumen yang digunakan

Dalam kegiatan pendataa, penetapan, dan pembayaran pajak air, Dinas Pendapatan mengeluarkan suatu surat berupa dokumen.

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besaran jumlah pajak air bawah tanah dan atau air permukaan yang diambil dan atau dimanfaatkan wajib pajak dalam suatu masa pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan yang menentukan besaran jumlah pajak yang terutang.
3. Tanda Bukti Penerimaan adalah tanda bukti yang diberikan kepada wajib pajak setelah melakukan pembayaran pajak air.

4.1.2. Analisis Prosedur Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

Berikut ini adalah prosedur pengelolaan pajak air yang berjalan :

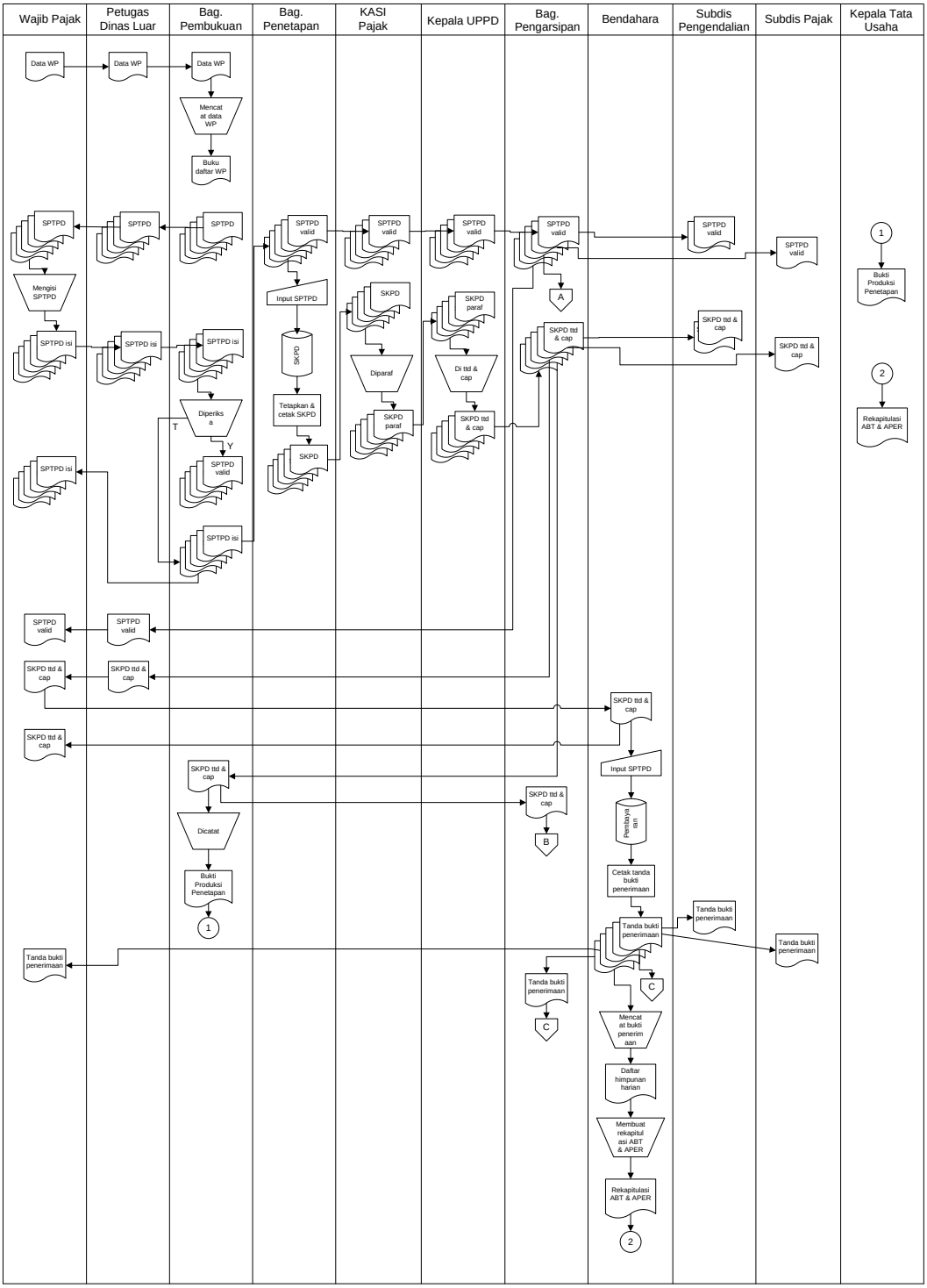
1. Wajib Pajak (WP) memberikan data WP kepada petugas dinas luar.
2. Petugas dinas luar memberikan data WP kepada bagian pembukuan. Bagian pembukuan mencatat data WP dalam buku daftar WP.
3. Bagian pembukuan mempersiapkan SPTPD sebanyak 5 rangkap dan diserahkan kepada petugas dinas luar.
4. Petugas dinas luar menyerahkan SPTPD kepada WP untuk diisi.
5. SPTPD yang sudah diisi diberikan kepada bagian pembukuan untuk diperiksa kelengkapannya. Apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap SPTPD diberikan kepada bagian penetapan.
6. Bagian penetapan menginput data SPTPD, menetapkan pajak dan mencetak SKPD sebanyak 5 rangkap.
7. SPTPD dan SKPD diberikan kepada kepala seksi (KASI) Pajak. KASI Pajak memberikan paraf pada SKPD.
8. SPTPD dan SKPD diberikan kepada kepala UPPD. SKPD ditandatangani oleh kepala UPPD.
9. SPTPD dan SKPD diberikan kepada bagian pengarsipan untuk dipilah. Lembar pertama SPTPD dan SKPD untuk WP, lembar kedua dan ketiga SPTPD dan SKPD untuk Sub Dinas (Subdis) pengendalian (Propinsi), lembar keempat SPTPD dan SKPD untuk Sub Dinas

(Subdis) pajak (Propinsi) dan lembar kelima SPTPD dan SKPD untuk bagian pengarsipan.

10. SKPD dari bagian pengarsipan diberikan kepada bagian pembukuan untuk dicatat dalam buku produksi penetapan yang akan diberikan kepada kepala tata usaha. SKPD diberikan kembali kepada bagian pengarsipan untuk disimpan sebagai arsip.
11. petugas dinas luar memberikan SPTPD yang sudah valid dan SKPD yang sudah ditandatangani dan di cap kepada WP.
12. WP melakukan pembayaran di bagian bendahara dengan menyerahkan SKPD yang sudah ditandatangani dan di cap.
13. bendahara mengeluarkan tanda bukti penerimaan sebanyak 5 rangkap. Tanda bukti peneriamaan tersebut diberikan kepada WP, Subdis pengendalian, Subdis pajak, benadahara dan bagian pengarsipan, masing-masing 1 lembar.
14. Bendahara mencatat penerimaan pajak air dalam satu hari dalam daftar himpunan harian. Daftar himpunan harian direkap menjadi rekapitulasi air bawah tanah (ABT) dan air permukaan (APER), yang akan diberikan kepada kepala tata usaha.

4.1.2.1. Flow map Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

Flow map adalah peta yang memberikan gambaran urutan-urutan pelaksanaan tugas kegiatan dari mulai input, proses serta output yang dihasilkan.



Gambar 4.1 Flow map Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

Keterangan :

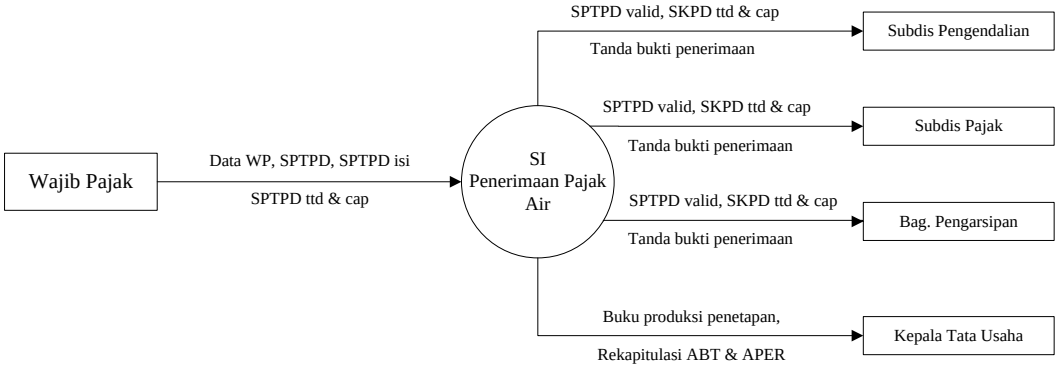
A : Arsip SPTPD

B : Arsip SKPD

C : Arsip Tanda Bukti Penerimaan

4.1.2.2. Diagram Konteks Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

Diagram konteks merupakan diagram yang memperlihatkan entitas luar yang berinteraksi dengan system penerimaan pajak air adalah sebagai berikut :



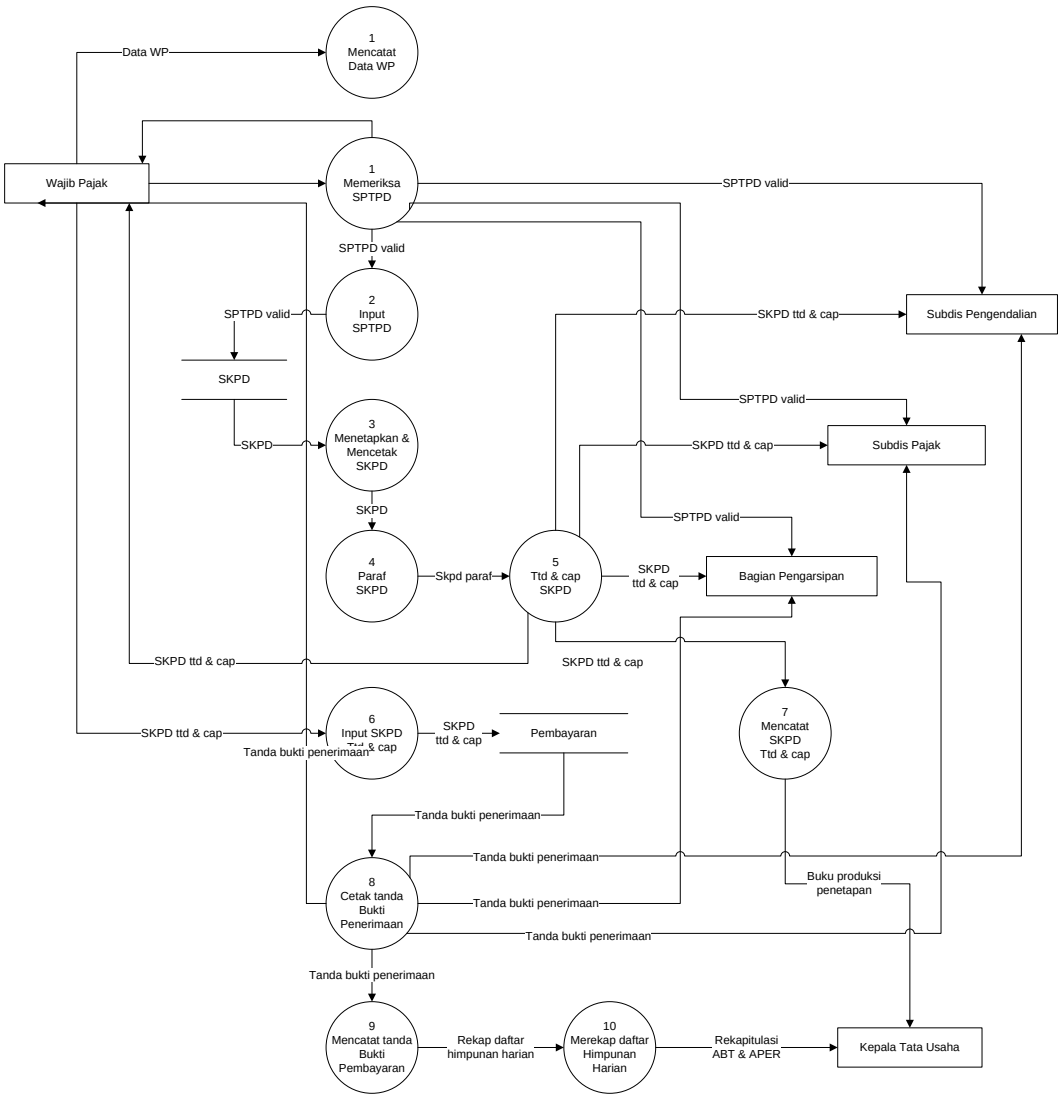
Gambar 4.2 Diagram Konteks

Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

4.1.2.3. Data Flow Diagram Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu gambaran system secara logika, diagram ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah modul system informasi dalam bentuk jaringan proses-proses yang saling terhubung satu sama lain.

Data Flow Diagram system pengelolaan pajak air yang sedang berjalan digambarkan pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 Data Flow Diagram Level 1

Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

4.1.3. Evaluasi Sistem Pengelolaan Pajak Air yang sedang Berjalan

Berdasarkan analisis system pengelolaan pajak air yang berjalan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan system informasi dalam pengelolaan pajak air terdapat beberapa permasalahan.

Permasalahan yang ada pada system pengelolaan pajak air yang sedang berjalan yaitu:

Tabel 4.1.

Evaluasi Sistem yang Sedang Berjalan

No	Masalah	Solusi
1.	System masih bersifat *single user*, sehingga sumber daya yang sudah tersedia dapat digunakan secara efisien.	Membuat program aplikasi yang bisa digunakan *multi user.*
2.	Data wajib pajak dicatat dalam buku daftar induk wajib pajak memerlukan waktu yang cukup lama.	Membuat penyimpanan data wajib pajak dalam bentuk database, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali data wajib pajak.
3.	SPTPD dan SKPD yang telah ditetapkan disimpan menjadi arsip dan dicatat pada buku produksi penetapan, sehingga dalam pencarian data SPTPD dan SKPD menggunakan waktu yang cukup lama.	Membuat penyimpanan data SKPD dalam bentuk database, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali data SPTPD dan SKPD pajak.

4.	Proses perhitungan besar ketetapan pajak air dan denda masih menggunakan perhitungan manual.	Membuat suatu fungsi perhitungan otomatis untuk menghitung besar ketetapan pajak air dan denda.
5.	Bendahara harus mencatat tanda bukti penerimaan untuk membuat daftar himpunan harian dan membuat rekapitulasi ABT dan APER	Dalam pogram aplikasi, terdapat menu laporan penerimaan pembayaran yang berisi penerimaan pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan laporan.